Volume 10 No. 6/Maret 2017 ISSN : 1979 - 5343

KEKUASAAN DAN MASYARAKAT MULTIKULTUR DI INDONESIA

Oleh :
JENI MINAN
(Dosen STISIP Banten Raya Pandeglang)

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang kekuasaan multikultur yang dipraktikan oleh pemerintah terhadap masyarak multikultur di Indonesia. Metode yang digunakan kualitatif, dengan menganalisis buku-buku yang sesuai dengan kajian dan dikaitkan dengan realitas politik dari hasil observasi lapangan terhadap kasus-kasus terkait. Tulisan ini mendapati bahwa perlu keseriusan dan penyadaran yang tinggi oleh masyarak dalam menyikapi segala bentuk perbedaan dan yang kedua rerpon negatif masyarakat multikultur Indonesia terhadap kekuasaan multikurtur karena kebijakan-kebijakan nasinal yang dikeluarkan pemerintah cendrung pilih kasi dan tidak berkeadilan social.

Kata kunci : Kekuasaan dan masyarakat multikultur

A. Pendahuluan

Indonesia terlahir dengan penduduk yang multikultur, baik dari sisi ras, suku, bahasa dan agama. Keragaman di negeri ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dinapikan oleh siapapun. Sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan dalam pengelolahan negeri tercinta ini, tidak terkecuali kebijakan politik nasional pemerintah, harus memperhatikan aspek keragaman dan berkeadilan sosial. Hai ini mengingat bahwa kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mudah membangkitkan kemarahan masyarakat.

Awal masukknya priode reformasi sampai pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, isu politik multikulturalisme di Indonesia semakin mengguat. Hal ini dianggap bahwa multikulturalisme yang dikomandoi oleh memerintah ini dapat menjadi solusi atas peristiwa-peristiwa masa lalu yang terjadi dan telah mencedrai kesatuan bangsa ini. Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh sebab etnik, suku, agama, budaya yang akhirnya masuk ke ranah konflik politik di tengah masyarakat Indonesia terjadi diakibatkan kurangnya kesadaran untuk menghargai identitas dan budaya satu sama lain.

Multikulturalisme politik yang coba dikembangkan dan diperdalam di Indonesia melahirkan sebuah kebebasan yang nyaris tidak terbatas; kebebasan berpendapat, berpolitik, berserikat dan bahkan kebebasan menafsirkan kebebasan itu sendiri dilakukan oleh siapa saja yang berkemampuan untuk melakukannya. Artinya praktek multikulturalisme harus konstitusional menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat secara budaya, agama maupun politik.

Memasuki era yang sangat globalis ini, perubahan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap politik, salah satunya lahir dari prilaku politik multikulturalis yang ditampilkan oleh para penguasa dan politisi bangsa ini, melalui kebijakan politik yang dikeluarkan, sosialisasi politik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dari tampilan-tampilan serta berita yang selalu hangat dikonsumsi masyarakat melalui media. Perubahan yang sangat terlihat adalah mengenai isu kebebasan, pembangunan, keragaman, kesatuan, pluralisme, toleransi dan kebersamaan yang sedikit-demi sedikit coba menengelamkan budaya dan identitas-identitas yang sudah lama muncul dalam masyarakat Indonesia. Artinya politik multikulturalisme yang ditanamkam dan langsung diawasi oleh penguasa bangsa ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa di republik ini. Tulisan ini coba membahas respom masyarakat multikuttur terhadap politik multikultul yang dijalankan oleh penguawasa di Indonesia.

A. Metode Penulisan

Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif, dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa buku teori dan buku yang membahas tentang identitas politik dan multikulturalisme politik kemudian menganalisis teori dan dikaitkan dengan realitas politik yang terjadi sekarang ini dengan kesesuaian dari data primer yang penulis peroleh langsung melalui pengamatan terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia.

B. Masyarakat Multikultur

Masyarakat dalam prespektif sosiologi dikenal dengan *animal society*, yaitu binatang masyarakat dan dalam prespektif politik dikenal dengan *zon politikon.* Sedangkan usaha untuk mengenali masyarakat sesuai dengan apa yang mereka yakini, mereka lakukan dan bagaimana mereka bertindak dapat dipahami melalui konsep budaya (*culture*). Keragaman budaya inilah yang sering melahirkan konflik sosial dan politik di Indonesia, baik antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok maupun masyarakat dan pemerintah.

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut, inilah penyebab munculnya istilah multikulturalisme.

Pada dasarnya multikulturalisme adalah pandangan dunia - kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan - yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan dapat juga dipahamni sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam "*Politics Of recognition*" (Azyumardi Azra, 2007). Artinya multikulturalisme merupakam usaha untuk menyatukan budaya yang berbeda baik secara individual maupun secara kebudayaan (Watson, 2000). Juga untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang beragam kehidupan dunia dan penekanan akan penerimaan terhadap adanya berbagai budaya yang telah ada dalam masyarakat, yang berkaitan dengan nilai sosial, budaya dan politik yang dianut.

Adapun pengertian multikulturalisme yang mengacu pada terrminologi deskriptif adalah keragaman budaya yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang mampu membangkitkan perasaan berbeda bagi identitas kolektif mereka. Sedangkan multikulturalisme berdasarkan terminologi normatif bermakna penguatan positif, bahkan merayakan keragaman komunal yang didasarkan pada hak-hak dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda untuk mengakui dan menghargai serta saling menberikan kebaikan bagi keragaman moral dan budaya masyarakat yang lebih luas (Andrew Heywood, 2016:522).

Keanekaragaman masyarakat Indonesia menjadi kekuatan sekaligus modal sosial (*social kapital*) untuk mewujudkan tata kelola negara kebangsaan yang maju, unggul dan sejahtera. Realitas warna-warni dalam sebuah negara bukan hanya menggambarkan keindahan tapi menampilkan kerukunan, kedamaian dalam pergaulan satu sama lain.

Menurut Parsudi Suparlan (2000), masyarakat multikultural Indonesia bercorak masyarakat majemuk (*prural society)*, masyarakat seperti ini akan memenuhi unsur normatif yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat yang majemuk.

Artinya mereka menerima perbedaan pendapat, ide, nilai budaya dalam kesederajatan; memahami, mengerti, menghargai dan menilai budaya, pendapat, ide, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan orang lain; adanya toleransi untuk menghargai pendapat, program dan karya orang lain walaupun ada perbedaan; dan memperlakukan semua sisi kebenaran secara merata. Karenanya masyarak seperti ini tidak pasif dan intoleransi bahkan mereka sangat berhubungan dengan timbal balik prinsip demokrasi.

C. Multikulturalisme dan Politik

Sebelum reformasi, karakteristik kekuatan pengikat keanekaragaman itu adalah model politik sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan pemerintah yang otoriter. Penerapan konsep multikuturasisme yang akan diterapkan sekarang ini tentunya harus dirumuskan secara bersama dan tidak sepihak dari pemerintah saja, agar tidak terjebak untuk yang kesekian kalinya pada persoalan yang sama, seperti : diskriminasi pemerintah-rakyat, pengusaha-pekerja, mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan dan sebagainya.

Politik multikulturalisme ialah suatu sistim pemerintahan di mana semua identitas khusus yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat mendapat ruang. Semua kelompok dari berbagai kalangan budaya, etnik, agama, kepercayaan, dan bahasa mendapat tempat untuk menyalurkan aspirasinya serta ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan bangsa dan negara. Tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hak untuk berperan serta dalam bidang politik dan pemerintahan terbuka lebar bagi semua kelompok etnis. Liliweri (2005) menegaskan bahwa politik multikulturalisme berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat yang dirancang, agar seluruh masyarakat dapat memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok yang tumbuh di sebuah negara. Politik multikulturalisme ialah kebijakan politik suatu negara yang berkeadilan tidak merugikan dan menguntungkan slah satu kelompak.

Tujuan dan sasaran dari politik multikulturalisme ialah pengakuan akan kesederajatan bagi semua komunitas dan budaya, toleransi, dan solidaritas guna menciptakan ruang publik agar berbagai ragam komunitas dapat berinteraksi untuk memperkaya budaya dan memfasilitasi partisipasi dalam gerak pembangunan bangsa (Liliweri, 2005).

Berbagai bentuk multikulturalisme umumnya memiliki tujuan politis yang dapat merekonsiliasi keragaman budaya dengan kohesi sipil, juga bukan satu dokrin tunggal dalam arti tidak ada satu pun prespektif yang dapat

disepakati tentang bagaimana masyarakat multi budaya beroperasi. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatis, tetapi cara pandang kehidupan manusia sebagai suatu paradigma (Leo Suryadinata, 2002). Sebagaimana perspektif Will Kymlicka (2007), pemberian ruang bagi kalangan minoritas suatu negara tak bisa dicapai hanya lewat jaminan hak-hak individual dalam UU. Minoritas yang dimaksud Kymlicka adalah minoritas budaya, yang harus diperhatikan keunikan identitasnya.

Namun pada praktiknya politik multikulturalisme seringkali ditempatkan bukan pada tempatnya demi kepentingan politik yang tersembunyi. Sehingga mengisolasi kelompok-kelompok yang jauh dari kekuasaan. Hal ini tentunya betentangan dengan hakikat multikulturalisme yang merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan sama dan menguntungkan satu sama lain dimana ada pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural.

Politik multikulturalisme yang dijalankan secara benar oleh sebuah bangsa akan melahirkan kelebihan etis, praktis dan partisipatif. Karena dalam multikulturalisme diasumsikan bahwa etnosentrisme, xenisentrisme, dan xenophobia bukanlah hal yang patut. Adapun yang patut adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak keanekaan budaya. Jadi, multikulturalisme memproklamirkan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing memiliki hak hidup yang wajib dihormati, bukan menghilangkan budaya-budaya kecil yang dianggap akan mengahambat kekuasaan pemerrintahan dengan dalih tidak pancasilais seperti yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Multikulturalisme menghargai perbedaan dan keberbedaan. Namun, perbedaan dan keberbedaan yang tak dikelola dengan baik akan menjadi sumber perselisihan, konflik, dan kekerasan. Oleh karena itu, harus ada formula pemahaman yang tepat-guna untuk mendamaikan dan menyatukan (Rizal Mubit, 2016).

Di Indonesia, banyak sekali konflik timbul karena masalah suku, agama, ras dan antar-golongan (*sara*). Kasus Tolikara, Tanjung Balai, dan Pilkada DKI yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, terkait isu *sara*. Meski sejak awal kemerdekaan kita sudah berkomitmen dan menyuarakan Pancasila, masalah kebinekaan atau kini istilahnya multikulturalisme/pluralisme ternyata belum selesai.

Dalam kasus-kasus sara, kaum terpinggirkan dan minoritas melihat pemerintah sulit menyembunyikan "pilih kasih" nya karena terbukti memihak mayoritas. Diakui atau tidak, pemerintah sedikit banyak membela

mayoritas. Itulah perasaan dan kebatinan kaum minoritas. Namun, suasana kebatinan di kalangan mayoritas justru sebaliknya, menganggap pemerintah terlalu memihak minoritas. Pemerintahan dinilai tak adil dan tak tulus menyikapi aspirasi mayoritas terkait masalah sosial, ekonomi, politik, agama, ideologi, dan kultural yang beraneka ragam dan berlapis-lapis. Apabila keberpihakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tidak bisa dihentikan, tentunya hal ini akan menciptakan perlawanan-perlawanan kelompok masyarakat yang merasadirugikan terhadak kebijakan pemerintah yang tidak adil. Artinya politik multikultur penguwasa bukan menciptakan kedamaian tapi akan melahirkan pertentangan-pertentangan politik. Ada beberapa model multikulralisme seperti yang terlihat dalam table di bawah ini:

Gambar C.1 Tipe –Tipe Multikulturalisme

	Multikulturalisme Liberal	Multikulturalisme Pluralis	Multikulturalisme Kosmopolitan
Tema kunci	- Kosmo politanism - Hak-hak kaum minoritas - Keragaman menperkuat toleransi dan otonomi pribadi	-Politik identitas - Kemelekatan budaya - Penindasan terhadap kelompok penentang keragaman	- Kosmopolita nisme - Percampuran budaya - Hibriditas
Tujuan utamama	Keragaman budaya dalam kerangka liberal-demokratis	Keragaman ‘’kuat’’ mengaku legimitasi nilai-nilai non-liberal dan liberal	Identitas yang cair dan multi-identitas akan memberikan dasar bagi warga dunia

Sumber: Andrew Hywood, 2012.

D. Kekuasaan Multikultur

Semua masyarakat di Negara manapun memiliki lokalitas dalam arti ia berada dalam identitas yang saling berbeda. Nasionalitas menunjuk pada karakter umum kekuasaan mulai dari situasi kekuasaan, proyeksi, cita-cita politik bersama yang hendak dituju, sampai pada kendali kekuasaan. Selanjutnya, globalitas masyarakat adalah ruang di mana perdebatan, dialektika dan paradigmatik menyangkut emansipasi kemanusiaan

berlangsung antar berbagai pandangan, keyakinan, ideologi, dan sistem kebudayaan lainnya.

Ideologi multikulturalisme merupakan bentuk ideologi yang paling ideal dan harus selalu dijunjung tinggi untuk suatu negara terutama kepada negara yang mencanangkan demokrasi. Multikulturalisme memberikan ruang gerak bagi semua rakyat dalam suatu negara. Multikulturalisme juga telah mempraktekkan kebijakan sosial untuk memanusiakan manusia dalam ruang lingkup bernegara.

Pemerintahan Indonesia yang pada dasar dan faktannya berdasar politik multikulturalisme dan politik identitas sudah semestinya memberikan ruang bagi semua politik identitas yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Kepentingan setiap kelompok identitas haruslah diberikan tempat untuk kemudian berdialog dengan kepentingan dalam relasi kekuasaan, di tengah Indonesia sebagai negara bangsa yang memiliki keragaman yang sangat kompleks. Tidak hanya itu beragam 'bangsa' yang ada di Indonesia juga memiliki kelompok-kelompok identitas kultural (Suku Bangsa) di dalamnya. Kultur itu sendiri adalah pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang, atuapun suatu kelompok sebagai dasar pemikiran ataupun tindakannya.

Adanya beragam kultur bisa menjadi potensi kekayaan budaya bangsa yang besar, sekaligus potensi pemecah dan pemicu konflik, Prinsip dasar yang harus dijadikan acuan adalah, bahwa setiap kultur memiliki nilai pada dirinya sendiri. Setiap orang ataupun kelompok berhak hidup seturut dengan kultur yang mereka yakini secara otentik. Pemerintahan multikulturalisme adalah cerminan dari masyarakat Indonesia yang juga multikultur, sehingga potensi sosial multikultur ini agar dapat terkonsolidasikan dengan baik menjadi kekuatan nasional dalam wilayah sosial ekonomi dan politik, bargaining national menjadi keharusan dalam tujuan di tengah situasi gelobal yang sedang mengalami puncak kompetisi perebutan wilayah ekonomi politik kekuatan negara-negara besar beserta kekuatan modal internasional, konsolidasi dan renegosiasi nasional adalah langkah dan tujuan politik, sebagai manivestasi kedaulatan dan pertahanan sosial ekonomi dan politik dalam menyangga kedaulatan nasional agar tidak terkoyak oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik gelobal.

Lokalitas-nasionalitas-globalitas adalah ras dimana tindakan pemikiran dikembangkan melalui spektrum fundamental sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Kalau ditarik langsung dalam kontek pembicaraan saat ini, cara pandang kritis dan tindakan transformatif senantiasa

merupakan proses membangun relasi yang utuh antara geo-sosial-ekonomi-politik dan cara pandang kemanusiaan beserta piranti sosial ekonomi dan sosial budaya yang demokratis.. Demokrasi dalam artian "kemanusian yang, adil, bermartabat dan beradab. dan demokratisasi serta perjuangan politik yang berbasis identitas bukanlah etnosentris semata-mata tapi tidak pula karena kemunculan banyak partai dapat diartikan sebagai indikator kebebasan vulgar liberalism dalam hal Indonesia, dan keindonesiaan ini menjadi konsekwensi logis dari "Bineka Tunggal Ika dan Demokrasi Panca Sila". tentunya sebagai falsafah hidup dan sistim hidup, tidak begitu saja lahir atas kepentingan dan kesepakatan politik sesaat elit nasional atas kesadaran manusia nusantara pada saat itu, akan tetapi hasil dari dialektika empiris bangsa ini dan menjadi final karena dapat menjadi jalan tengah atau persimpangan jalan dari segala pertentangan sosial politik identitas di Indonesia,. Namun yang Tampak bahwa multikulturalisme kaum mayoritas masih bersifat eksklusif dan non-akomodatif terhadap minoritas, begitu pula sebaliknya di kalangan minoritas.

David Miller (1995) menulis bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan- perbedaan antar kelompok budaya dengan mengorbankan berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong para warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan. Anne Phillips (2007), multikulturalisme akan menghancurkan kohesi sosial, melemahkan identitas nasional, mengosongkan sebagian besar dari isi konsep kewarganegaraan. Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme dalam psike kelompok- kelompok kultural.

Belajar dari apa yang telah terjadi di Indonesia, maka multikulturalisme akomodatif sangat relevan karena di sini masyarakat plural yang memiliki kultural dominan membuat penyesuaian, mengakomodasi kebutuhan kultur minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif niscaya merumuskan dan menerapkan UU, hukum, dan kekuatan sensitif secara kultural dengan memberikan kesempatan kepada minoritas untuk mengembangkan kebudayaannya, sementara pada saat yang sama minoritas tak menentang kultur yang dominan itu (Azyumardi Azra, mengutip Bikhu Parekh, 2002).

Sekiranya multikulturalisme akomodatif sudah membudaya di kalangan mayoritas, kalau pihak

minoritas berbuat khilaf atau salah, mudah diselesaikan dan tak perlu menimbulkan aksi-aksi politik dan fisik berwajah kekerasan, yang riskan dan rentan bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Setiap kali terjadi kekhilafan dan kesalahan oleh minoritas, problem ini relatif mudah dipecahkan dan dituntaskan melalui komunikasi, dialog, tabayun, dan pertukaran pikiran, gagasan, dan pengalaman interaksi sosial-kultural nyata. Tanpa harus ke ranah hukum atau penjara, dan lebih mengedepankan pendekatan sosial-kultural bercorak silih asih, asah, asuh.

E. Kesimpulan

Untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia diperlukan kesadaran yang serius. Sebagai negara yang masyarakatnya multikultur, maka pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan agar tidak melahirkan kecemburuan dari beberapa kelompok masyarakat dan budaya yang ada. Multikulralisme akomodatif harus menjadi agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Terutama dalam pengakomodasian aspirasi dan suara kaum minoritas dalam ruang publik yang kian pengap oleh tarik-tolak kepentingan ekonomi-politik. Dengan demikian, Indonesia tetap bisa memelihara dan melestarikan kemajemukan dan kebinekaan di era globalisasi.

Respon negatif terhadap kebijakan keseragaman pemerintah muncul karena politik multikultur yang diterapkan pemerintah dianggap pilih kasih dan tidak berkeadilan sosial. Sehingga ketegangan itu merembet keberbagai maslah seperti ketegangan antar agama, ekonomi, politik, ideologi, dan konflik kepentingan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2007. *Identitas dan Krisis Budaya*: Membangun Multikulturalisme Indonesia.

Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan,* Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Bikhu, Parekh, 1997. *National Culture and Multiculalism*. London: Sage Publications.

Budiman, Hikmat (ed). 2005. Hak Minoritas Dilema Multikulturisme di Indonesia. Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation.

Heywood, Andrew. 2012. *Ideologi Politik.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Kymlicka, Will. 2007. *Multicultural Odysseys*. Oxford: Oxford University Press.

Ki Supriyoko, 2011. *Kemajemukan Budaya, Jati Diri Bangsa dan Ketahanan Nasional Dalam Perspektif Pendidikan*. Makalah disampaikan dalam dialog budaya daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18-19, 2011.

Liliweri, Alo.2005. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.

Lubis, Akhyar Yusuf, 2006. *Deskontruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu

Ngainun Naim & Achmad Suqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Nurkhoiron, M. 2007. "*Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal", dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Editor: Marsudi Noorsalim, dkk. Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation

Parekh, Bhiku. 2007. *Rethinking Multikulturalism* Keberagaman Budaya dan Teori Politik. Yogyakarta: Kanisius.

Parekh, Bikhu.2001. Rethinking Multiculturalism. Harvard.

Phillips, Anne. 2007. *Multiculturalism Without Culture*. Princeton: Princeton University Press.

Sparringa, Daniel. 2006. *Multikulturalisme Indonesia: Nilai-nilai Baru Untuk Indonesia Baru (sebuah jawaban terhadap kemajemukan*). Jakarta, 18 November 2006.

Stephen R. Store and Lauiza Cortesao, *Multiculturalism and Educational Policy in a Global Contex,* 2000.

Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Keynote Address* Simposium III Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.